

BAHASA ERA PASCA- KEBENARAN DALAM TINJAUAN HERMENEUTIK KECURIGAAN HABERMAS

Oleh: Frano Kleden
(Mahasiswa Semester VII)

Lancarnya lalulintas informasi sebagai dampak langsung dari terus meningkatnya perkembangan digitalisasi telah membuka sebuah era baru dalam sejarah kehidupan manusia, ialah era pasca-kebenaran. Era pasca-kebenaran menjadi sebuah diskursus dalam sejarah kehidupan manusia di mana orang banyak mengabaikan etika berpendapat, mengedepankan berita hoaks atau fitnah yang tujuannya mengaduk-aduk emosi massa.¹ Pada era ini, bukan lagi kebenaran objektif dan faktual-lah yang menjadi patokan, melainkan daya tarik emosi dan perasaan masyarakat. Asumsi inilah yang lantas membuat siapa saja dapat ‘mengakali’ setiap orang dengan menggembarkan keyakinan emosionalnya.

1 Fathorrahman Ghufan, “Menyikapi Era Defisit Kebenaran”, *Kompas*, 6 Januari 2017, hlm 7.

Gaya yang paling mencolok dari era pasca-kebenaran ialah peminggiran kebenaran dalam menyampaikan informasi atau gagasan. Secara khusus, kebenaran dianggap ‘hampir tamat’ dari sejarah kehidupan manusia. Era pasca-kebenaran berkelindan erat dengan kebohongan dalam mengelola informasi ke ranah publik. Pelbagai informasi digunakan untuk kepentingan tertentu dan mengarahkan publik agar berlaku sesuai dengan pembuat kabar bohong. Kebohongan ini berkembangbiak dalam wujud-wujud yang kompleks seperti dalam penyangkalan terhadap fakta, ketidakjujuran penguasa, misinformasi, ujaran-ujaran kebencian (*hate speech*), propaganda, provokasi, penyebaran hoaks, *fake-news*, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelbagai produk era pasca-kebenaran tersebut serentak memengaruhi urusan politik, sosial dan keagamaan tertentu. Yang menjadi soal di sini ialah ketika masyarakat akhirnya mendapatkan informasi yang sepotong-potong berkaitan dengan hal-hal yang urgen dalam masyarakatnya. Masyarakat jadi dilema, bingung dan tak tahu arah mana yang benar. Maka, bukan tidak mungkin, posisi seperti ini membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem seperti liberalisme, fundamentalisme, sektarianisme, radikalisme dan terorisme dalam masyarakat.²

Dapat dikatakan bahwa era pasca-kebenaran ibarat sebuah ruang baru yang terbuka, yang lebih-lebih ditandai dengan jejaring sosial yang menciptakan agora³ baru, suatu alun-alun publik tempat manusia

2 Frano Kleden, “Suara dari Bukit: Hoaks, Radikalisme dan Demokrasi”, dalam Seri Buku VOX 62/02/2017, *Hoaks, Radikalisme dan Demokrasi* (Maumere: 2017), hlm. 11.

3 Agora adalah sebuah term Yunani yang berarti tempat pertemuan terbuka di negara-kota di Yunani Kuno (900-700 SM) antara warga, dewan kota dan raja untuk bermusyawarah mencari jalan keluar bagi pelbagai persoalan kota atau negara. Dalam konteks sekarang, agora dimengerti selain sebagai forum curah pendapat di depan umum, juga sebagai pasar. Agus Alfons Duka, *Komunikasi Pastoral Era Digital* (Ledalero: Maumere, 2017), hlm. 70-71.

berbagi gagasan, informasi, pendapat, dan yang di dalamnya relasi-relasi dan bentuk-bentuk komunitas baru dapat terwujud.⁴ Salah satu unsur utama yang menandai era pasca-kebenaran ialah penggunaan bahasa. Di era pasca-kebenaran ini, dalam batang tubuh setiap berita, ujaran dan informasi apapun, kerap terlukis bahasa-bahasa yang bersifat sensasional. Judul-judul berita yang provokatif, ujaran-ujaran yang bernada hipokrit serta gosip-gosip murahan yang beratensi mengaduk-aduk emosi juga turut meramaikan suasana era ini. Pada level ini kita tidak dapat menyangkal lagi bahwa era pasca-kebenaran telah membalut semua kebohongan dengan bagus dan rapi menjadi sebuah kebenaran.

Memasuki dunia pasca-kebenaran berarti kita turut serta mengembangkan tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang baik, dalam hubungan dengan dunia dan sesama. Di hadapan manusia, pasca-kebenaran sejatinya lebih mengundang kita bagaimana seharusnya bersikap terhadap kebenaran itu sendiri. Akan menjadi apa sebuah obyek kebenaran sangat bergantung pada subjek (kita) yang menerima obyek tersebut secara utuh dan mengolahnya. Namun, dalam realitas masyarakat, kita kerap menjumpai betapa masyarakat kita belum sepenuhnya siap ketika menghadapi fakta bahwa yang dia yakini sebagai yang ‘pasti benar’ selama ini, sebenarnya ‘mungkin saja keliru’. Kita menjadi ‘gagap’ untuk mengakui kenyataan bahwa orang lain, kelompok lain atau lembaga lain yang berseberangan dengan kita memiliki sisi-sisi kebenaran tersendiri. Hal ini bukan mustahil menimbulkan kesalahpahaman tersendiri.

Kesalahpahaman yang terjadi seperti ini merupakan sebuah peristiwa yang harus memerlukan pembenaran (verifikasi bukan rasionalisasi). Salah satu metode yang dipakai untuk menemukan kebenaran ialah dengan menggunakan hermeneutik. Seperti halnya era pasca-kebenaran

4 Kalimat ini merupakan pesan Paus Benediktus XVI pada Hari Komunikasi Sedunia ke-47 tahun 2013. Pesan ini lahir dari pembacaan cermat Paus terhadap perkembangan jejaring sosial digital. *Ibid.*

yang bertautan erat dengan bahasa, hermeneutik dalam metodenya juga melibatkan bahasa sebagai medium utama dalam menyampaikan pesan⁵. Menjelajahi dunia hermeneutik mendorong kita menggunakan senjata nalar untuk mendongkrak makna-makna yang tersembunyi di balik setiap bahasa peristiwa. Dengan bahasa kita berpikir, berbicara, menulis. Dengan bahasa kita juga dapat mengerti dan membuat interpretasi.

Berhermeneutik identik dengan aktus pembebasan manusia dari belenggu kegelapan, ketidakjelasan dan ketidakpastian. Melalui aktus hermeneutik manusia dapat menziarahi kehidupan ini secara bermartabat.⁶ Hermeneutik di sini tidak hanya menggarap urusan bagaimana proses ‘memahami’ dan menafsirkan yang benar (aspek epistemologis dan metodologis), tetapi lebih jauh hermeneutik juga menggarap asumsi-asumsi dasar dan kondisi serta kedudukan manusia serta segala faktor yang terlibat dalam proses penafsiran yang dimaksud (aspek ontologis dan aksiologis). Dari asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa konflik dan pelbagai pertentangan yang bahkan sering membawa korban sebagai akibat dari perbedaaan pandangan dan pemahaman sebenarnya merupakan sesuatu yang naif. Sebab setiap orang ingin agar pemahaman dan penafsirannya-lah yang paling benar (*truth-claim*).

Saya mencoba membedah serentak membuat kritik terhadap bahasa yang ditampilkan di panggung era pasca-kebenaran dalam tinjauan

5 Pesan-pesan tersebut dipetik dari teks. Teks yang berusaha ditafsirkan dan dipahami tersebut hendaknya dimengerti secara luas sebagai jejaring makna atau struktur simbol-simbol, entah tertuang sebagai tulisan ataupun bentuk-bentuk lain. Teks tersebut meliputi perilaku, tindakan, norma, mimik, tata nilai, isi pikiran, percakapan, benda-benda kebudayaan, obyek-obyek sejarah dan seterusnya. Singkatnya, segala hal yang berhubungan dengan manusia dan dimaknai oleh manusia yaitu kebudayaan, agama, masyarakat, negara dan bahkan seluruh alam semesta adalah teks. F. Budi Hardiman, *Seni Memahami* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 12.

6 Fritz Fios, “Suara dari Bukit: Hermeneutik: Menafsir untuk Memaknai Horison Hidup”, dalam seri buku VOX, 47/3-4/2003, *Tradisi dan Hermeneutik* (Mauere: Ledalero), hlm. 9-10.

hermeneutik Jurgen Habermas.⁷ Bahwasannya dalam perjalanannya, tidak ada sebuah bahasa yang bersifat netral. Habermas sebagaimana dikutip Emanuel Riroin Tanu, menunjukkan kurang lebih ada empat hal yang membuat kita harus bersikap kritis atau curiga terhadap bahasa.⁸ *Pertama*, bahasa selalu dikontaminasi oleh kekuasaan. *Kedua*, bahasa selalu digunakan untuk sebuah kepentingan. *Ketiga*, bahasa hanya memuat sepotong pengalaman dari keseluruhannya dan atau (tambahan saya: bahasa diperluas dari sepotong kecil pengalaman). *Keempat*, pengalaman-pengalaman yang dibahasakan bisa jadi adalah pengalaman-pengalaman yang menyimpang.

Di era pasca-kebenaran, instrumen paling ampuh penyebab berita bohong dan segala produksi konten negatif komunikasi antarmanusia ialah bahasa. Dalam hal ini bahasa dipakai tidak lebih dari sekadar alat permainan dan sarana penyampaian pesan lisan dan tulis. Bahasa memantik nafsu setiap orang untuk berbicara, berdiskusi dan berdebat.

7 Hermeneutik yang digagas oleh Habermas lebih dikenal dengan hermeneutik kecurigaan atau hermeneutik kritis. Hermeneutik Habermas lahir atas kritiknya terhadap hermeneutik Gadamer yang hanya menekankan ciri ontologis hermeneutiknya saja. Menurut Habermas, hermeneutik Gadamer menghalangi hermeneutik dalam menjalankan peran kritik sosial. Habermas melihat bahwa hermeneutik Gadamer hanya bertujuan komunikatif yaitu memperoleh pemahaman. Misalnya tradisi. Hermeneutik Gadamer tidak membuat penilaian kritis atas tradisi. Bagi Habermas, tugas refleksi filosofis tidak selesai dengan menunjukkan pengondisian pemikiran kita oleh tradisi, tetapi juga harus sanggup membantu membebaskan manusia dari belenggu tradisi yang represif. Paul Budi Kleden, *Hermeneutika (ms.)* (Mauwere: STFK Ledalero, 2007), hlm. 59. Dalam hubungan dengan era pasca-kebenaran, kecurigaan terhadap kurang sempurnanya klaim-klaim kebenaran yang terkandung dalam karya seorang pengarang menjadi celah bagi eksistensi hermeneutik kritis. Pengalaman mengenai hal-hal yang separuh benar, kebohongan, propaganda, manipulasi, penganiayaan pikiran, sensor dan sebagainya memunculkan sebuah persoalan yang *prima facie* berlawanan dengan kebenaran objektif. Di sinilah hermeneutik menjalankan fungsi kritiknya. Josef Bleicher, *Hermeneutika Kontemporer- Hermeneutika sebagai Metode, Filsafat dan Kritik*, penerj. Ahmad Norma Permata (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2013), hlm. 213-214.

8 Emanuel Riroin Tanu, "Pentingnya Hermeneutik Kecurigaan terhadap Tradisi (Menelaah Kritik Habermas terhadap Hermeneutika Gadamer)", dalam seri buku VOX 47/3-4/2003, *op. cit.*, hlm. 20.

Demikianpun secara tertulis, bahasa dipakai sebagai kanal perundungan (*bullying*) yang melaluinya sang pengguna akan merasa puas jika pihak lain dirugikan, dicelakakan, disusahkan dan dienyahkan dari panggung kekuasaan. Kekuasaan bahasa dalam hal ini seringkali digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan pengaruh.⁹

Untuk itu, bahasa harus kita pikirkan sebagai yang mengalami perubahan. Bahasa yang termanifestasi dalam era pasca-kebenaran melalui media-media sosial misalnya, pada umumnya lebih menggelorakan persaingan dan kebencian. Rekayasa opini media akhirnya memengaruhi publik, lantas membuat publik membenarkan hal-hal tertentu. Era pasca-kebenaran menjadikan media sosial sebagai alat perebutan makna. Siapa yang berhasil membangun citra (*image*) akan mendapatkan legitimasi publik seperti yang mereka inginkan. Padahal fakta yang muncul di media tidak sama dengan fakta yang sebenarnya. Dengan kata lain, ia hanyalah hasil rekonstruksi dan olahan para awak di meja-meja redaksi.

Juga acapkali media melalui bahasanya yang cenderung hiperbolis-bombastis, hadir sebagai alat kepentingan tertentu. Untuk kepentingan politis media misalnya hadir untuk membangun pencitraan terhadap figur-figur tertentu. Di sini media sendiri melawan fitrahnya sebagai pilar demokrasi yang bebas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun jalan yang dilalui itu seringkali menyesatkan ketika ‘kebebasan’ diterjemahkan sebagai bebas menulis apa saja, bebas merekayasa apa saja. Media-media era pasca-kebenaran *hic et nunc* hidup dari upaya merekayasa fakta dan menyesatkan opini publik.¹⁰

Hermeneutik selalu lebih daripada sekadar mengetahui makna atau menandai kata-kata yang digunakan dalam ujaran. Memahami diarahkan

9 Juan Orong, "Hoaks, Eufemisme Politik dan Nalar Puitis", dalam Seri Buku VOX 62/02/2017, *op. cit.*, hlm. 20-21.

10 Isidorus Lilijawa, *Perempuan, Media dan Politik* (Mauwere: Ledalero, 2010), hlm. 141-143.

kepada sebuah keseluruhan dan mengisyaratkan keterlibatan total: akal, emosional, moral sebagai subjek. Itulah sebabnya Habermas memberi peringatan kepada kita, bila menghadapi sebuah horison yang terasa asing atau suatu hal yang bersifat distorsif, kita harus menggaliinya. Tujuan dari penggalian itu adalah untuk menemukan unsur-unsur yang tersembunyi dan mengangkatnya ke taraf kesadaran manusia atau masyarakat.

Habermas mengeritik ideologisasi bahasa sebab bahasa bukan hanya sebuah sarana komunikasi yang murni. Bahasa bukanlah faktor utama yang menentukan sebuah pemahaman akan sesuatu. Sumbangan termulia sekaligus orientasi hermeneutik kecurigaan Habermas adalah terwujudnya kesadaran dan pembebasan bagi manusia (masyarakat) dari unsur-unsur bahasa yang membelenggu. Orientasi dari hermeneutik Habermas bersifat politis yaitu terciptanya sebuah interaksi yang sehat yaitu adanya komunikasi, saling pengertian, pengakuan satu sama lain dan tiadanya penentuan-penentuan teknologis pada kemanusiaan. Situasi inilah yang disebutnya sebagai *herrschaftfrei*, sebuah ruang lingkup yang 'bebas penguasaan'.

Ditegaskan bahwa hermeneutik kecurigaan Habermas ini tidak berangkat dari satu kepercayaan dasar untuk mulai memahami sesuatu, tetapi dari satu kecurigaan bahwa di dalam sesuatu itu ada penyimpangan, ada ketidakadilan atau alienasi. Hermeneutik berperan untuk memungkinkan sebuah komunikasi yang bebas tekanan. Penafsir harus selalu mengambil sikap curiga terhadap permainan kuasa yang melandasi sebuah pemaknaan.¹¹ Dengan memahami sesuatu secara benar, kita dapat melaksanakan komunikasi secara tepat pula. Sebab kita berkomunikasi dengan baik kalau kita memang saling memahami.

11 Layaknya psikoanalisis, penafsir tidak serta-merta menerima makna tampilan guna mengalihkan perhatian pada makna laten. Makna laten adalah makna sesungguhnya yang terdistorsi secara sistematis ketika naik ke kesadaran kolektif. Joko Siswanto, *Horizon Hermeneutika* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 97.

Habermas sebagaimana dikutip Paul Budi Kleden menyebutkan empat syarat sebuah komunikasi yang ideal.¹² *Pertama*, kejelasan. Kita hanya dapat memahami sesuatu secara benar dalam sebuah komunikasi apabila apa yang disampaikan, disampaikan secara jelas. Bahasa yang saya gunakan dan gerak tubuh yang menyertainya menyingkapkan secara jelas apa yang saya maksudkan. Saya tidak menggunakan kata dan mimik yang ambigu. Bahasa atau ungkapan yang dipakai memang dapat dipahami dalam lingkungan tersebut. *Kedua*, kebenaran. Kita hanya dapat memahami sesuatu dalam satu komunikasi jika sesuatu itu benar. Apa yang disampaikan adalah apa yang diketahui dengan benar oleh seseorang. *Ketiga*, kejujuran. Maksudnya, apa yang disampaikan memanglah apa yang mau disampaikan. Orang tidak sedang menutup-nutupi sesuatu. Orang tidak menipu diri dan orang lain. *Keempat*, apa yang disampaikan adalah sesuatu yang betul. Maksudnya, apa yang dikatakan seseorang adalah sesuatu yang wajar, yang sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Kita tidak akan memahami sesuatu yang sama sekali di luar apa yang biasa dan diterima dalam komunitas bahasa kita. Dalam hermeneutik kritis syarat-syarat ini harus diperhatikan.

Era pasca-kebenaran dan segala wujud bahasa isu, sensasi, informasi, berita dan masalah yang keluar darinya perlu dicurigai secara kritis. Hermeneutika kecurigaan yang telah dicanangkan oleh Habermas hendaknya menjadi praksis yang kritis-emansipatoris dalam masyarakat era pasca-kebenaran. Dengannya, kita dapat mengembangkan dan menyusun secara baru struktur-struktur masyarakat dengan meniadakan segala unsur yang bersifat represif. Sebab penegakan kebenaran yang menjadi tujuan hermeneutik kecurigaan ditaksasi dapat mewujudkan kemajuan (emansipasi) dan pembebasan humanitas di era pasca-kebenaran ini.

12 Paul Budi Kleden, *op. cit.*, hlm. 64-65.

Beriringan dengan kajian di atas, tulisan-tulisan yang terkumpul dalam majalah *AKADEMIKA* ini adalah upaya untuk membaca fenomena era pasca-kebenaran dan tanggapan-tanggapan filosofis, antropologis, sosial, politik tentangnya.

Johan Paji dalam artikelnya mengemukakan bahwa era pasca-kebenaran, walaupun berangkat dari situasi dan faktor-faktor yang kompleks, senantiasa didukung oleh watak anti-intelektual masyarakat. Dengan demikian, fenomena anti-intelektualisme ialah pra-kondisi yang membuat politik pasca-kebenaran tumbuh subur. Tesis dasar ini kemudian berimplikasi pada tesis berikutnya yakni bahwa proyek melampaui era pasca-kebenaran mutlak harus dimulai dengan mengatasi watak anti-intelektual dalam masyarakat. *Johan* mengambil hipotesis bahwa menggobalnya rezim pasca-kebenaran, selain karena penguasa yang bobrok dan dominasi media sosial, juga karena ‘didukung’ oleh masyarakat sendiri. Fakta membuktikan bahwa pelbagai kondisi dalam masyarakat justru melegitimasi eksistensi era (politik) pasca-kebenaran ini. Berhadapan dengan rezim pasca-kebenaran ini, ada dua tawaran solutif yang bisa dilakukan. *Pertama*, melenyapkan perilaku anti-intelektual dalam masyarakat. Dengan berperilaku kritis dan anti-dogmatis, maka proyek politik pasca-kebenaran niscaya dapat diatasi oleh masyarakat. *Kedua*, memperkuat peran para *truth-teller* (intelektual, akademisi yang masih setia berpegang kepada kebenaran) di ruang publik.

Dalam kajian terhadap sejarah filsafat kontemporer, *Rio Nanto* menegaskan bahwa narasi relativisme kebenaran yang diusung postmodernitas menjadi rahim yang melahirkan era pasca-kebenaran. Maka, berhadapan dengan ketegangan rasionalitas kebenaran dan reproduksi kebohongan yang melibatkan emosi, penyampaian kebenaran pasca-kebenaran tidak hanya melibatkan fakta dan data. Penyampaian

kebenaran perlu menggunakan nalar puitik yaitu metafor yang mampu menyentuh kesadaran publik. Nalar puitik di ruang publik ini menjadi suatu strategi untuk menghadapi era pasca-kebenaran. Dalam pasca-kebenaran, kebenaran dengan cara persuasi yang melibatkan emosi jauh lebih penting dari pada represi rasionalitas. Dengan ini masyarakat akan mudah mengerti kebenaran itu karena menyentuh daya afeksi dan emosi.

Arsen Jemarut membaca era pasca-kebenaran dalam pemikiran Goenawan Mohammad. Mengutip Goenawan, Arsen menjelaskan pentingnya etika kedaifan dalam era pasca-kebenaran. Ciri eksistensial manusia sebagai makhluk daif merupakan dasar utama penolakan perlakuan terhadap klaim kebenaran sebagai sesuatu yang kebal terhadap koreksi. Etika kedaifan merupakan alat penghubung antarmasyarakat dalam era pasca-kebenaran. Alat penghubung ini memungkinkan terciptanya momentum diskursus dan momentum pertukaran gagasan. Melalui kesadaran manusia sebagai makhluk daif, manusia pasca-kebenaran terbangun dari tidur dogmatis, yakni dogma yang ditawarkan oleh paham postmodernisme. Etika kedaifan ini menjadi suatu alarm yang akan selalu mengingatkan manusia untuk tidak boleh terperangkap dalam sikap absolutisasi paham dan sikap alergi terhadap koreksi. Hanya dengan hidup berlandaskan etika kedaifan ini, manusia dapat sadar untuk selalu terbuka terhadap pertukaran gagasan dan terbuka terhadap pihak luar.

Selanjutnya *Doni Koli* dalam artikelnya menegaskan bahwa eskalasi diskursus seputar era pasca-kebenaran sebenarnya beriringan dengan masalah ketika pembumian atau institusionalisasi nalar demokrasi mendapat tantangannya. Sudah tentu pengorganisasian berita dan informasi dalam era pasca-kebenaran menjadi momok berbahaya bagi institusionalisasi demokrasi. Dia mengemukakan tiga upaya menginjeksi sikap kritis dalam masyarakat yang sedang berada dalam era *post-truth*,

berikut upaya mengawal institusionalisasi demokrasi dari serangan lingkaran setan yang merupakan pertautan antarakebenaran post kebenaran dan populisme. *Pertama*, dengan mulai berpikir kritis. *Kedua*, rejuvenasi dan penguatan pendidikan literasi. *Ketiga*, menumbuhkan nasionalisme.

Edo Putra dalam tulisannya menegaskan bahwa falsifikasi Karl Popper merupakan salah satu cara yang dapat dipakai untuk menghadapi era pasca-kebenaran. Dalam metode falsifikasi, kebenaran sebuah teori selalu dapat diuji dan dapat dibuktikan salah. Hal inilah yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menyikapi era pasca-kebenaran. Di tengah maraknya penyebaran hoaks atau berbagai informasi palsu, masyarakat perlu mengecek dan meneliti kebenaran setiap berita dengan baik. Setiap informasi dan berita yang ada perlu diuji kebenarannya dengan mencari berbagai bukti yang berkaitan dengan informasi-informasi itu. Jika setiap informasi itu dapat diuji dan dibuktikan salah, maka informasi itu bukanlah suatu informasi yang benar atau hanya merupakan sebuah berita palsu. *Edo* menyimpulkan di akhir tulisannya bahwa melalui konsep falsifikasinya, Popper sebetulnya mau mengamanatkan kepada kita akan pentingnya berpikir kritis dan budaya membaca.

Secara lebih spesifik lagi, *Elik Amut* menegaskan bahwa era pasca-kebenaran dewasa ini juga ditandai dengan keberadaan salah satu kekuatan besar yang sudah, sedang dan kemungkinan besar akan terus mempengaruhi dan menentukan gerak peradaban manusia, yaitu sistem ekonomi kapitalisme-neoliberalisme. Dalam tulisannya, *Elik* menunjukkan bahwa kapitalisme-neoliberalisme sesungguhnya adalah sebuah sistem ekonomi yang beroperasi melalui mekanisme dan logika penuh tipu daya dan muslihat. Alih-alih berikhtiar membangun dan menyejahterakan masyarakat dunia terutama di negara-negara miskin, sistem ekonomi ini malah lebih sering membawa kehancuran dan

pemiskinan sistemik. Sebagai solusi, *Elik* menawarkan opsi dekolonial sebagai antitesis atas gagasan dan praktik kapitalisme-neoliberalisme. Opsi dekolonial ini pada gilirannya menciptakan kondisi atau keadaan pasca-kolonial yaitu kondisi setelah terbebas dari penjajahan.

Hal khusus juga diangkat *Donatus Vedin* dalam artikelnya berjudul “Pers dan Relativitas Kebenaran”. Menurutnya, pers tidak lagi berperan sebagai sumber utama informasi (yang benar) dan diskursus yang menjadi syarat kemungkinan bagi adanya masyarakat informatif, seperti yang diasumsikan paradigma positivistik-liberal. Alhasil, masyarakat luas terjebak dalam rezim pasca-kebenaran, rezim di mana masyarakat luas sulit membedakan kebenaran dari kebohongan, fakta dari fiksi, berita dari *entertainment*, informasi dari iklan. *Donatus* memberikan harapan baru pada masyarakat bahwa masyarakat dapat mengkritisi pemberitaan media hanya jika memiliki kualitas intelektual yang baik. Oleh karena itu, membaca merupakan salah satu jalan untuk mencapai hal tersebut. Seorang yang sering melakukan aktivitas membaca akan memperoleh banyak informasi dan pengetahuan akan semakin meluas serta daya nalar akan semakin kritis. Sebaliknya, ketidakseringannya seseorang membaca akan berdampak pada terbatasnya pengetahuan dan tendensi untuk berpikir sempit.

Secara sederhana *Veris Koten* dalam artikelnya menyebut bahwa kehadiran media informasi ibarat munculnya penguasa baru yang menuntut setiap orang untuk tunduk kepadanya. Di sinilah kekritisannya kita sebagai makhluk berakal budi dibutuhkan dan demikianlah kekhasan kita. Pada bagian inti tulisannya, *Veris* menawarkan opsi cara berpikir kritis sebagai salah satu tindakan penting yang diambil dalam menyikapi arus informasi yang merebak begitu saja. Dan menurut *Veris*, kita bisa berkaca pada pemikiran kritis para filsuf seperti Aristoteles dan Hannah Arendt.